

Heboh! Saat Warga Parung Panjang Ngebor Sumur, Muncul Semburan Gas

PARUNG PANJANG (IM) - Sumur rumah warga di Perumahan Serpong Garden Village, Kecamatan Parung Panjang, Kabupaten Bogor, menyemburkan gas. Belum diketahui penyebab dan kandungan dalam gas tersebut.

Kapolsek Parung Panjang, Kompol Wagiman menjelaskan, peristiwa itu berawal saat pengeboran sumur di salah satu rumah warga pada Sabtu (26/2). Saat mencapai kedalaman 40 meter, muncul semburan gas dari dalam sumur tersebut.

"Tiba-tiba keluar gas, bau menyengat, dan suara bergemuruh," kata Wagiman di Bogor, Selasa (1/3). Karena khawatir, pengeboran

sumur langsung dihentikan. Selanjutnya, pemilik rumah melaporkan kejadian tersebut ke pihak Polsek Parung Panjang.

"Peristiwa tersebut dilaporkan ke pihak Polsek Parung Panjang. Kami langsung melakukan pengecekan ke lokasi kejadian," jelas Wagiman.

Belum diketahui pasti penyebab kemunculan gas maupun kandungan dalam gas dari dalam sumur tersebut. Saat ini, petugas telah menutup sumur dan memasang garis polisi di sekitar lokasi untuk menghindari kejadian yang tidak diinginkan.

"Lokasi itu sementara ditutup. Kepada Satpam supaya jangan ada yang mendekati lokasi," pungkasnya. ● **pur**

Gudang Gas di Bogor Terbakar dan Meledak

BOGOR (IM) - Diduga akibat korsleting listrik, gudang gas di Jasinga, Kabupaten Bogor meledak dan ludes terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran tersebut.

Kapolsek Jasinga, AKP Fajar Hidayat menuturkan, lokasi kejadian berada di Kampung Petey RT 05/03, Desa Kalong Sawah Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor, Selasa (1/3), sekitar pukul 00.30.

"Saat kebakaran terjadi ledakan-ledakan, mungkin tabung gas yang terbakar. Untungnya petugas damkar dan masyarakat sigap sehingga kebakaran tidak meluas ke rumah sekitar lokasi dan tidak ada korban jiwa," papar Fajar mengonfirmasi, Selasa pagi.

Kata dia, gudang yang terbakar milik agen gas Andri dan dugaan sementara akibat korsleting atau arus pendek listrik.

"Kita masih melakukan

pemeriksaan untuk memastikan," katanya.

Fajar menjelaskan, imbas kebakaran puluhan tabung gas elpiji berbagai ukuran ikut terbakar, karena api cepat merambat ke semua area bangunan.

"Total ada 111 tabung berbagai ukuran ikut terbakar dengan rincian 40 tabung elpiji, 50 tabung oksigen, 12 jenis aragon, dan 9 astelin," jelasnya.

Pemadaman dibantu warga dan unit damkar sektor Leuwiliang ikut evakuasi lokasi kejadian yang berlangsung sampai pukul 01.30 WIB.

Ia menuturkan, untuk saat ini lokasi masih tidak boleh ada yang melintas dan tengah dilakukan penyelidikan lebih lanjut.

"Kami berikan garis polisi di tempat kejadian perkara, karena tim masih terus mengumpulkan data penyebab utama kebakaran," kata Fajar. ● **gio**



IDN/ANTARA

KOLEKSI KAIN BATIK JLAMPRANG USIA 1 ABAD Kepala Museum Batik Akhmad Asror mengamati koleksi Batik Jlamprang di Museum Batik Pekalongan, Jawa Tengah, Selasa (1/3). Menurut pihak museum, kain batik tulis bermotif Jlamprang khas Pekalongan itu merupakan salah satu aset kain batik berusia sekitar 1 abad yang dibuat sekitar tahun 1900 dan saat ini menjadi salah satu koleksi kain batik kuno di museum.

DBMP dan Jasa Sarana Janji Perbaiki Jalan Transyogi yang Rusak

JONGGOL (IM) - Camat Jonggol, Andri Rahman meminta Pemprov Jawa Barat segera meningkatkan atau memperbaiki Jalan Transyogi dan menerangi ruas jalan tersebut.

Terutama yang terbentang di wilayah Jonggol-Cariu dan Tanjungsari, yang berbatasan langsung dengan Kecamatan Cikalong Kulon, Kabupaten Cianjur.

Hal itu karena, selain kondisi jalan yang sudah rusak dan bahkan bergelombang, minimnya lampu penerangan jalan umum juga menjadi penyebab kecelakaan lalu lintas di wilayah tersebut.

"Pada pertemuan dengan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil Sabtu pekan kemarin, saya sudah menyampaikan agar jalan milik Provinsi Jawa Barat yaitu Transyogi segera diperbaiki atau ditingkatkan. Kondisi ini yang rusak parah, ditambah minimnya penerangan menjadi penyebab tingginya angka kecelakaan lalu lintas," kata Andri Rahman kepada wartawan, Selasa (1/3).

Menanggapi permintaan Camat Jonggol, Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil meminta Dinas Bina Marga dan Pengairan (DBMP) Jawa Barat dan PT. Jasa Sarana segera memperbaiki atau meningkatkan Jalan Transyogi.

"Kalau DPMB Jawa Barat anggarannya belum

disiapkan, maka bisa juga PT. Jasa Sarana selaku badan usaha milik daerah (BUMD) Jawa Barat bisa memperbaiki jalan tersebut dengan dana kasnya, lalu uang kasnya bisa diganti oleh DBMP di anggaran pendapatan belanja daerah perubahan (APBD-P)," pinta Ridwan Kamil.

Kepala DBMP Jawa Barat, Bambang Tirtoyuliono mengaku secara bertahap akan segera memperbaiki atau meningkatkan Jalan Transyogi, atau ruas jalan milik Provinsi Jawa Barat lainnya.

"Secara bertahap kami akan melakukan terobosan dan peningkatan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat, yang terpenting itu kita segera melakukan perbaikan jalan milik Provinsi Jawa Barat yang kondisinya rusak," tutur Bambang.

Ia menjelaskan dari 182 Km jalan milik Provinsi Jawa Barat yang ada di Kabupaten Bogor, 30-35 Km di antaranya dalam kondisi rusak dengan titik yang tersebar dan sporadis.

"Ada 12 ruas jalan milik Provinsi Jawa Barat dengan total panjang 182 Km, kondisi jalan yang rusak 30-35 Km dengan titik yang tersebar dan sporadis. Perbaikan atau peningkatan jalan tersebut berikut pembangunan drainase, tentunya bakal menjadi prioritas kami," jelasnya. ● **gio**

8 | Nusantara



IDN/ANTARA

TEATERIKAL SERANGAN UMUM 1 MARET 1949

Komunitas Djokjakarta 1945 melakukan drama teaterikal perang di Museum Benteng Vredenburg, Yogyakarta, Selasa (1/3). Teaterikal tersebut merefleksikan peristiwa perjuangan masyarakat Yogyakarta melawan penjajahan Belanda pada 1 Maret 1949.

Bupati Bogor Dorong Pembangunan Jalur Puncak II untuk Pecah Kemacetan

Selain memecah kemacetan di Jalan Raya Puncak, Jalur Puncak II dianggap memiliki peran vital dalam meningkatkan infrastruktur jaringan jalan regional di wilayah Jawa Barat dan akan menghubungkan wilayah di kabupaten/kota Bogor, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Karawang.

CIBINONG (IM) - Bupati Bogor, Ade Yasin kembali mendorong pembangunan Jalur Puncak II (Poros Tengah Timur), usai terjadinya kemacetan parah di Jalan Raya Puncak, Kabupaten Bogor pada libur panjang (long weekend) 26-28 Februari 2022.

"Harus ada solusi untuk memecah kemacetan di Puncak. Kan Puncak II lokasi sudah ada, tanahnya juga sudah ada. Kita juga sudah ajukan ke

pemerintah pusat," kata Ade Yasin, Selasa (1/3).

Kata dia, Pemkab Bogor tidak punya kuasa untuk 'memodifikasi' Jalan Raya Puncak.

Pasalnya, jalan tersebut kewenangannya dimiliki pemerintah pusat. Beberapa tahun lalu sempat ada pelebaran jalan dan jembatan namun dilakukan Kementerian PUPR.

Untuk membangun Jalur Puncak II dari Sentul hingga

Cianjur sepanjang Rp33 kilometer, Pemkab Bogor tidak memiliki cukup anggaran yang diperkirakan mencapai Rp5 triliun.

Selain memecah kemacetan di Jalan Raya Puncak, Jalur Puncak II dianggap memiliki peran vital dalam meningkatkan infrastruktur jaringan jalan regional di wilayah Jawa Barat dan akan menghubungkan wilayah di kabupaten/kota Bogor, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Karawang.

"Berdasarkan hasil kajian kami, pembangunan jalur puncak 2 akan menciptakan efisiensi jarak tempuh sekitar 16 persen dan menurunkan tingkat kemacetan di kawasan puncak sebesar 50 persen," kata Ade.

Ade juga mengungkapkan kawasan yang akan dilalui oleh jalan baru tersebut berpotensi yang cukup besar untuk dikem-

bangkan.

"Hingga saat ini sudah banyak dibuka kawasan wisata sehingga jika akses jalan ditingkatkan, akan membagi tujuan wisata masyarakat, tidak lagi terfokus ke puncak," katanya.

Jalan Kecil, Kendaraannya Banyak

Bupati Bogor, Ade Yasin menyebut penyebab utama kemacetan di kawasan Puncak seperti yang terjadi akhir pekan lalu karena lebar jalan yang tidak memadai. Sehingga, ketika kawasan tersebut diserbu puluhan ribu kendaraan dalam satu waktu, kemacetan tidak dapat terhindarkan.

"Pasti dengan jalan yang kecil dan dengan volume kendaraan yang banyak. Kalau menurut informasi dari Kapolres itu ada lebih dari 80 ribu kendaraan, pasti lah akan terjadi kemacetan. Di mana pun itu, kalau jalannya kecil kendaraannya banyak, pasti akan terjadi kemacetan," kata Ade Yasin.

Ade Yasin menambahkan, pihaknya tidak bisa melarang masyarakat untuk tidak berwisata di kawasan Puncak. Yang bisa dilakukannya yakni menyediakan jalur alternatif seperti Jalur Puncak 2.

"Jadi saya kira ini mungkin karena pengaruh libur panjang juga banyak orang turun berwisata. Tapi rata-rata kalau kita lihat kan rata-rata orang luar Bogor. Saya kira kita tidak bisa melarang ya dengan kondisi seperti ini," katanya.

Himpaudi Kota Bogor Berharap Ada Bantuan Khusus BPJS Ketenagakerjaan

BOGOR (IM) - Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia (Himpaudi) Kota Bogor berharap ada anggaran dari pemerintah khusus untuk BPJS Ketenagakerjaan. Pasalnya, sejak September 2020, anggota Himpaudi membayar BPJS Ketenagakerjaan secara swadaya dan mandiri dari gaji yang minim.

Ketua Himpaudi Kota Bogor, Srie Harniasih mengatakan, dari 1.043 tenaga pendidik yang mengajari di 247 PAUD se-Kota Bogor, sekitar 400 di antaranya belum terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan. Srie mengatakan, pihaknya sempat mengajukan diri ke Ketua DPRD Kota Bogor, untuk menyampaikan aspirasi dari anggota Himpaudi terkait biaya BPJS Ketenagakerjaan.

"Kami di tahun 2020 sudah sowan ke ketua DPRD menyampaikan aspirasi Himpaudi Kota Bogor ini untuk bagaimana bisa diangkat atau dianggarkan untuk BPJS Ketenagakerjaan. Karena BPJSTK ini sangat penting, karena kami organisasi non-profit tanpa ada gaji yang layak," kata Srie, Selasa (1/3).

Lebih lanjut, Srie mengatakan, sejak 2020 hingga saat ini Himpaudi membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan secara swadaya dan mandiri.

Ia pun berharap di anggaran pemerintah berikutnya, seluruh anggota Himpaudi bisa mendapat fasilitas perlindungan diri secara merata.

"Alhamdulillah Himpaudi Kota Bogor sejak September 2020 sudah bergabung dan kami san-

"Tu sesuatu yang memang perlu ke depannya kita dorong kepada pemerintah untuk mencari alternatif jalan lain selain Puncak. Jadi, Puncak itu jangan hanya yang bisa kita andalkan. Tapi wilayah lain kan harus bisa ada solusi untuk memecah kemacetan Puncak," imbuhnya.

Menurutnya, Jalur Puncak 2 sudah disiapkan sejak lama. Hanya saja, masih menunggu pemerintah pusat untuk membantu pembangunan sebagai upaya dalam mengatasi kemacetan di Jalur Puncak saat ini.

"Lokasi sudah ada, tanah sudah ada kita juga sudah mengajukan kepada pemerintah pusat. Intinya bagaimana pemerintah pusat bisa mengambil kebijakan membantu Kabupaten Bogor memecah kemacetan," tuturnya.

"Kita siapkan lahannya, kita sudah siap sebenarnya lahannya. Kita bahkan pernah buka kerja sama dengan TNI sepanjang 1,5 km. Kita sudah siapkan lahan itu oleh pemerintah daerah. Tinggal dibangun dengan perencanaan dan lain-lain. Saya kira kalau feasibility study (FS) kita sudah punya juga. Jadi tinggal koordinasi aja sebetulnya," pungkasnya.

Sebelumnya, kawasan Puncak, Kabupaten Bogor sempat karena pengaruh libur panjang juga banyak orang turun berwisata. Tapi rata-rata kalau kita lihat kan rata-rata orang luar Bogor. Saya kira kita tidak bisa melarang ya dengan kondisi seperti ini," katanya.

Pemkab Bogor Resmikan 300 Redkar di Kab. Bogor



Wakil Bupati Bogor, Iwan Setiawan meresmikan 300 Redkar.

CIBINONG (IM) - Pemkab Bogor meluncurkan Relawan Pemadam Kebakaran (Redkar) yang jumlahnya 300 relawan.

Peluncuran relawan Redkar ini bertepatan dengan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-103 Damkar dan Penyelamatan Kabupaten Bogor tingkat nasional, di halaman Dinas Damkar Kabupaten Bogor, Cibinong, Selasa (1/3).

Wakil Bupati Bogor, Iwan Setiawan mengungkapkan, pihaknya telah membentuk relawan Redkar. Ini adalah bukti kongkrit Kabupaten Bogor sangat responsif dalam mendukung rencana Pemerintah Pusat. Hari ini kita laksanakan peluncuran Redkar dengan jumlah relawan kurang lebih 300 orang yang tersebar di 18 Kecamatan. "Mudah-mudahan para relawan ini punya tekad dan niat yang kuat dalam membantu dan menyelamatkan masyarakat, khususnya penduduk Kabupaten Bogor," ungkap Iwan.

Iwan menjelaskan, pihaknya mengapresiasi Damkar Kabupaten Bogor, dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia dan wilayah yang luas perlu adanya tim pengamanan, salah satunya dari Dinas Damkar.

Dengan jumlah penduduk yang banyak, permasalahan juga pasti akan banyak. Terutama di beberapa kecamatan dengan kepadatan penduduk yang cukup tinggi.

"Tugas pemadam kebakaran sangat mulia, saya tadi terharu melihat simulasi bagaimana semangat kerja petugas damkar, bekerja di tengah-tengah kobaran api. Ini salah satu bukti bahwa Damkar ini tugasnya sangat-sangat mulia untuk menyelamatkan manusia," tandas iwan.

Iwan berucap, insya Allah akan mengawal kebutuhan anggaran, dan segala kebutuhan-kebutuhan untuk membuat tangguh petugas Damkar Kabupaten Bogor.

"Atas nama Pemkab Bogor, saya mengucapkan dirgahayu yang ke-103 Damkar dan Penyelamatan Kabupaten Bogor, walaupun diselenggarakan melalui virtual karena masih dalam suasana pandemi, namun kita tetap semangat," tambah Iwan Setiawan.

Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Safrizal ZA menerangkan, melihat banyaknya kejadian kebakaran dan non kebakaran di Indonesia, tentunya keterlibatan aktif masyarakat dibutuhkan. Karena mengandalkan petugas kebakaran saja tidaklah cukup untuk

menjangkau hingga ke seluruh pelosok tanah air.

"Oleh karenanya Kementerian Dalam Negeri menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 36 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga untuk melibatkan peran serta masyarakat dalam bentuk dukungan relawan pemadam kebakaran atau disingkat sebagian Redkar," terang Safrizal.

Dengan partisipasi masyarakat, lanjut Safrizal, akan menjangkau seluruh lokasi di Indonesia dan mendukung upaya pemadam kebakaran untuk mencapai respon time 15 menit dari laporan terhadap kejadian bencana kebakaran dan penyelamatan.

"Para Gubernur, Bupati, dan Wali Kota sebagai pejabat pembina di daerah, untuk dapat menghitung kebutuhan aparaturnya pemadam kebakaran yang nantinya dapat dijadikan landasan dalam pengusulan formasi pemenuhan aparaturnya pemadam kebakaran dan penyelamatan dengan mekanisme pengangkatan CPNS maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K)," ucapnya. ● **gio**